

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih
IKU
Indeks Integritas Pemerintah Daerah

INTERMEDIATE OUTCOME I

Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan
IKU
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

INTERMEDIATE OUTCOME II

Peningkatan kualitas perencanaan
penganggaran daerah
IK1 Persentase kesesuaian perencanaan
dan penganggaran
IK2 Persentase dokumen penganggaran
yang selesai tepat waktu

Peningkatan kualitas Penatausahaan
keuangan daerah
IK1 Persentase penyampaian informasi
penatausahaan keuangan daerah
tepat waktu
IK2 Persentase penyerapan dana transfer
IK3 Persentase penyerapan belanja
daerah

Peningkatan kualitas pelaporan
keuangan pemerintah daerah
IK1 Persentase laporan keuangan
pemerintah daerah sesuai SAP
IK2 Persentase informasi keuangan
disampaikan tepat waktu

Peningkatan tata kelola barang milik
daerah
IK1 Kontribusi penerimaan daerah dari
BMD yang dimanfaatkan dan
dipindahtanggankan terhadap PAD
IK2 Jumlah temuan pemeriksaan
terhadap BMD
IK3 Jumlah Informasi data pengelolaan
BMD

INTERMEDIATE OUTCOME III

Sinergitas perencanaan dan
penganggaran
IK1 Persentase nomenklatur kegiatan
APBD sama dengan KUA PPAS

Efisiensi perencanaan penganggaran
IK Persentase pengalokasian anggaran
belanja sesuai aturan

Efektifitas perencanaan
penganggaran
IK Persentase kesesuaian penempatan
rekening penganggaran

Ketepatan waktu pengesahan dan
penyampaian Perda APBD
IK1 APBD ditetapkan sebelum tanggal 31
Desember

Akurasi data penerimaan daerah
IK Persentase kesesuaian data
penerimaan daerah dengan
Rekening Kasda

Penatausahaan pengeluaran daerah
sesuai aturan
IK1 Jumlah dana DAK yang dapat diserap
IK2 Penyampaian laporan dana transfer
sebelum sepuluh hari kerja setiap
triwulan berakhir
IK3 Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1
hari setelah SPM diterima
IK4 Persentase kesesuaian perhitungan
gaji dengan KP4

Optimalisasi Pengelolaan kas daerah
sesuai aturan
IK Kontribusi optimalisasi kas

Laporan keuangan daerah sesuai
SAP
IK Jumlah temuan BPK terhadap LKPD

Informasi keuangan disampaikan
Tepat Waktu
IK1 Penyampaian laporan keuangan
sebelum tanggal 20 setiap bulannya
IK2 Penyampaian LKPD ke BPK sebelum
31 Maret

Pencegahan terjadinya temuan BPK
yang akan mempengaruhi kewajaran
laporan keuangan
IK Jumlah temuan BPK yang dapat
ditindaklanjuti dari semua temuan
pra opini

Akurasi data barang milik daerah
IK Persentase kesesuaian data BMD
dengan fisiknya

Pemanfaatan barang milik daerah
IK Kontribusi penerimaan daerah dari
BMD yang dimanfaatkan terhadap
PAD

Peningkatan PAD dari BMD yang
dipindahtanggankan
IK Kontribusi penerimaan daerah dari
BMD yang dipindahtanggankan
terhadap PAD

OUTPUT

- 1 Dokumen KUA dan PPAS
- 2 Dokumen Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS
- 3 Perda APBD
- 4 Perwako APBD
- 5 Perda PAPBD
- 6 Perwako PAPBD
- 7 Dokumen Regulasi dan Kebijakan
Bidang Anggaran
- 8 Dokumen Kebijakan Perencanaan
Anggaran Pendapatan
- 9 Dokumen Kebijakan Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah
- 10 Dokumen Kebijakan Perencanaan
Anggaran Pembiayaan
- 11 Laporan pembinaan penganggaran

- 1 Dokumen SP2D
- 2 Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 3 Laporan pembiayaan daerah
- 4 Laporan dana transfer
- 5 Jumlah perhitungan dan penyetoran
potongan fihak ketiga (PFK) dan
- 6 Transaksi kas daerah
- 7 Berita acara rekonsiliasi data
penerimaan
- 8 Perwako Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan
- 9 Laporan pengelolaan dana cadangan
- 10 Data investasi pemerintah daerah
- 11 Data Perencanaan dan Pelaksanaan
Penerimaan Pinjaman Pemerintah
- 12 Data Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan
- 13 Dokumen Kebijakan dan alokasi
subsidi
- 14 Laporan Dana Darurat dan mendesak
- 15 Laporan dana bagi hasil
- 16 Laporan Data Keuangan
- 17 Sistem Keuangan terintegrasi

- 1 Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah
- 2 Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan
dan Aset Daerah
- 3 Laporan Keuangan semester 1 dan
Prognosis 6 bulan berikutnya
- 4 Berita Acara Konsolidasi Laporan
Keuangan
- 5 Pelaksanaan APBD
- 6 Pelaksanaan APBD
- 7 Laporan Tindak Lanjut LHP BPK
- 8 Laporan TP-TGR
- 9 Laporan Prosedur Analisis LPP APBD
- 10 Laporan dana transfer
- 11 Berita acara rekonsiliasi data
penerimaan
- 12 Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
- 13 Laporan Pelaksanaan Pembinaan
BLUD
- 14 Laporan Penyusunan Statistik KPD

- 1 Buku standar harga barang dan jasa
- 2 Dokumen standar sarana dan
prasarana
- 3 Dokumen RKBMD
- 4 Dokumen RKPBM
- 5 Dokumen Kebijakan pengelolaan
BMD
- 6 Data BMD yang diinventarisir
- 7 Sertifikat balik nama BMD
- 8 Dokumen Penilaian BMD
- 9 Berita Acara Rekonsiliasi Barang
- 10 Laporan BMD tahunan
- 11 Dokumen Penetapan Status BMD
- 12 Dokumen Pengalihan Status BMD
- 13 Dokumen Pemanfaatan BMD
- 14 Dokumen HGB diatas HPL

